

BAGIAN III
SISTEM AKUNTANSI SKPD

BAB 1
ASET

1.1 Piutang

1.1.1 Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah

1.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 17 Tahun 2005
- b. PP Nomor 58 Tahun 2005
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010
- d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- e. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.1.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Bendahara Penerimaan
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu
- c. Fungsi Akuntansi SKPD
- d. Pihak ketiga yang menerima layanan

1.1.4 Dokumen Dan Catatan

- a. Umur Piutang
- b. SKRD
- c. SKP
- d. STS

1.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Saat terjadi piutang	SKRD, SKP, Dokumen Sumber Sesuai Pendapatan	Finansial
		Piutang
		Pendapatan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pembayaran Piutang	STS	Finansial
		Kas di kasda Piutang

		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan LRA
C. Penyisihan		Finansial
		Beban penyisihan piutang Penyisihan piutang
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
D. Penghapusan piutang untuk metode penyisihan		Finansial
		Penyisihan piutang Piutang
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
E. Penghapusan piutang metode langsung		Finansial
		Beban Piutang
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
F. Pembayaran setelah penghapusan		Finansial
		Piutang Ekuitas Kas di kasda Piutang
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.2 Beban dibayar-dimuka

1.2.1 Definisi

Sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali.

1.2.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.2.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Bendahara Pengeluaran
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- c. Fungsi Akuntansi SKPD
- d. Pihak Ketiga

1.2.4 Dokumen Dan Catatan

- a. SP2D
- b. Bukti Perjanjian
- c. Bukti Memorial
- d. Kuitansi

1.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Pembayaran premi saat polis diterbitkan manfaat berlaku setara		
1. Menggunakan Dana GU/FUNGSIONAL	Kwitansi	Finansial
		Beban Dibayar dimuka Kas di bendahara pengeluaran
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL
2. Menggunakan dana LS	SP2D	Finansial
		Beban Dibayar dimuka R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL
B. Pengakuan beban (Akhir Bulan)		Finansial
		Beban barang jasa Beban dibayar dimuka
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Pembayaran premi saat polis diterbitkan berlaku surut		
1. Akhir bulan sebelum pembayaran		Finansial
		Beban barang jasa Hutang
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

2. Saat pembayaran		Finansial
		Hutang
		Beban dibayar dimuka
		Kas
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.3 Persediaan

1.3.1 Definisi

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

1.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.3.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Pejabat Penatausahaan Barang
- b. Pengurus Barang Persediaan
- c. PPTK
- d. Bendahara Pengeluaran
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

1.3.4 Dokumen Dan Catatan

- a. BAPB
- b. Berita Acara Stock Opname
- c. Kuitansi
- d. Faktur

1.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan		
1. Pembelian	BAPB	Finansial
		Persediaan Utang Belanja

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Produksi sendiri		Finansial
		Persediaan Pendapatan - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Hibah	BAPB	Finansial
		Persediaan Pendapatan Hibah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pembayaran	LS	Finansial
		Utang Belanja R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL
	GU/Kuitansi	Finansial
		Utang Belanja Kas di Bendahara
		Anggaran
		Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL
C. Inventarisasi fisik	BA Stock	Finansial
		Beban Persediaan Persediaan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
D. Penyesuaian Nilai	BA Stock	Finansial
		Beban Persediaan Persediaan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

E. Penjualan		Finansial
		Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal
F. Setor ke Kas Daerah		Finansial
		R/K PPKD Kas Di Bendahara Penerimaan
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan - LRA

1.4 Aset Tetap

1.4.1 Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

1.4.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 64 Tahun 2015

1.4.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Pengguna Barang
- b. Pejabat Penatausahaan Barang
- c. Pengurus Barang Aset
- d. Pejabat Penerima Barang
- e. Bendahara Pengeluaran
- f. Fungsi Akuntansi SKPD
- g. Pejabat Pengadaan

1.4.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP/BAST
- b. SP2D/Kuitansi
- c. MC (Monthly Certificate)/ Berita Acara Kemajuan Fisik

- d. BPP Termin
- e. Berita Acara Hibah
- f. STS/Nota Kredit

1.4.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan Aset		
1. Pembayaran Mekanisme LS		
a. Saat barang diterima oleh SKPD	BAPP/BAST	Finansial
		Aset Tetap Utang Belanja Modal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pembayaran oleh BUD	SP2D	Finansial
		Utang Belanja Modal RK- PPKD
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
2. Pembayaran Mekanisme LS dengan menggunakan uang muka		
a. Pembayaran Uang Muka	SP2D	Finansial
		Uang Muka R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
b. Kemajuan Fisik dimana Kemajuan Fisik melebihi uang muka	MC (Monthly Certificate)/ Berita Acara Kemajuan Fisik	Finansial
		Kontruksi Dalam Pengerjaan Uang Muka Utang Belanja Modal
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal
c. Pembayaran Utang Atas Kemajuan Fisik melebihi uang muka	SP2D	Finansial
		Utang R/K PPKD

		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap	BAPP	Finansial
		Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Pembayaran Mekanisme GU		
Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme GU	BAPP	Finansial
		Aset Tetap Utang Belanja Modal
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal
	Kuitansi	Finansial
		Utang Belanja Modal Kas Di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
3 Hibah		
Penambahan dari Hibah	BAST	Finansial
		Aset Tetap Pendapatan Hibah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Penambahan setelah perolehan		
1. Kapitalisasi berasal dari pemeliharaan berat	Berita Acara	Finansial
		Aset Tetap Beban Barang dan Jasa
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Penurunan Nilai Aset		
1. Penyusutan Nilai Aset	Laporan	Finansial
		Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Aset Ekstrakomptabel	BA	Finansial
		Beban Lain-lain Aset Tetap
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
D. Pemindahtanganan		
1. Pemberian Hibah		
a. Penyerahan Barang	BAST	Finansial
		Defisit Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Pertukaran Barang Sejenis	BA	Finansial
		Aset Tetap A1 Akumulasi Penyusutan A2 Aset Tetap A2
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Pertukaran Barang Tidak Sejenis	BA	Finansial
		Aset Tetap B Akumulasi Penyusutan A Aset Tetap A Defisit Pemindahtanganan/ Pemusnahan Aset Non Lancar
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penghapusan		
a. Penghapusan Karena Hilang	SKTJM	Finansial
		Defisit Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset tetap

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penghentian Karena Rusak/ Masa Manfaat Telah Habis	Surat Persetujuan Penghapusan	Finansial
		Aset Lain - Lain
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset tetap Akm Penyusutan Aset Lain - Lain
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1.5.1 Definisi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan swasta berdasarkan perjanjian

1.5.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

1.5.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Pengguna Barang
- b. Bendahara Penerimaan
- c. Pejabat Penatausahaan Barang
- d. Pengurus Barang Aset
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

1.5.4 Dokumen dan Catatan

- a. Surat Keputusan/MOU/Surat Perjanjian
- b. STS/Nota Kredit

1.5.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa		
Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa	SK	Finansial
		R/K PPKD Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa

		Anggaran
		Perubahan SAL Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa
B. Bangunan Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)		
Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah	SK	Finansial
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BGS Aset Tetap
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Bangunan Serah Guna - BGS (Build, Transfer, Operate - BTO)	SK	Finansial
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BGS (BTO) Aset Tetap Utang Jangka Panjang Lainnya - Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.6 Aset Tidak Berwujud

1.7.1 Definisi

Aset tidak berwujud (*intangible asset*) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual

1.7.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 32 Tahun 2016

1.7.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Pengguna Barang
- b. Bendahara Pengeluaran
- c. Pejabat Penatausahaan Barang

- d. Pengurus Barang Aset
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

1.7.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP/ Berita Acara Serah Terima
- b. SP2D
- c. SK Persetujuan Penghapusan
- d. BA Rekonsiliasi
- e. Berita Acara Penghapusan

1.7.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan Aset Tidak Berwujud		
1. Pembayaran dengan mekanisme LS		
a. Saat Serah terima Barang/ Pekerjaan	BAPP	Finansial
		Aset Tidak Berwujud Utang Belanja Modal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pelunasan/Pembayaran	SP2D	Finansial
		Utang Belanja Modal RK PPKD
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
2. Pembayaran dengan Mekanisme GU		
a. Saat Serah terima Barang/ Pekerjaan	BAPP	Finansial
		Aset Tidak Berwujud Utang Belanja Modal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b.Saat Pelunasan/Pembayaran	Kuitansi	Finansial
		Utang Belanja Modal Kas Di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL

3. Penambahan setelah perolehan		
a. Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan	BA Rekonsiliasi	Finansial
		Aset Tidak Berwujud Beban
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Hibah		
1. Penambahan dari Hibah	BAST	Finansial
		Aset Tidak Berwujud Pendapatan Hibah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Penurunan Nilai Aset		
1. Amortisasi Nilai Aset Lain - Lain (Aset Tidak Berwujud)	Laporan	Finansial
		Beban Amortisasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
D. Pemindahtanganan		
1. Pemberian Hibah		
a. Penyerahan Barang	BAST	Finansial
		Defisit Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penghapusan		
a. Penghapusan Karena Rusak/ Masa Manfaat Telah Habis (Usulan)	SK Persetujuan Penghapusan	Finansial
		Defisit Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar

		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Berita Acara Penghapusan	Finansial
		Defisit Penghapusan Aset non Lancar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Penghapusan langsung	Berita Acara Penghapusan	Finansial
		Beban Aset Tidak Berwujud
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.7 Aset Lain-lain

1.7.1 Definisi

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.7.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 53 Tahun 2012

1.7.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Pengelola Barang Milik Daerah
- b. Pengguna Barang
- c. Pengurus Barang
- d. Bendahara Penerimaan BPKAD
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

1.7.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK Persetujuan Penghapusan
- b. Berita Acara Penghapusan
- c. STS

1.7.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan Aset Lain - Lain		
1. Reklas dari Usulan Penghapusan	SK Persetujuan Penghapusan	Finansial
		Aset Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset tetap Akumulasi Aset Tetap Lainya
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pengurangan Aset Lain		
1. Pelepasan Aset Lain - Lain dengan Pemusnahan	Berita Acara Penghapusan	Finansial
		Defisit Penghapusan Aset non Lancar Akumulasi Amortisasi Aset Lain Aset Lainnya
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyerahan Aset Lain - Lain Untuk Dijual	Berita Acara Penghapusan	Finansial
		RK – PPKD Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain Defisit Penghapusan Aset non Lancar Aset Lain - Lain
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Penjualan Aset Lain - Lain	STS	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

BAB 2

UTANG

2.1 Utang Jangka Pendek

2.1.1 Definisi

Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.1.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Bendahara Penerimaan
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu
- d. Fungsi Akuntansi SKPD
- e. Masyarakat Pengguna Fasilitas

2.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP
- b. SP2D
- c. Kuitansi

2.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Penerimaan Persediaan	BAPP	Finansial
		Persediaan Utang Belanja
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Penggunaan Utilitas	Bukti Tagihan	Finansial
		Beban Listrik/air/multimedia Utang Belanja
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Pembayaran menggunakan mekanisme LS	SP2D	Finansial
		Utang Belanja R/K PPKD

		Anggaran
		Belanja Perubahan SAL
Pembayaran menggunakan mekanisme GU	Kuitansi	Finansial
		Utang Belanja Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Perubahan SAL

2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

2.2.1 Definisi.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah *deferred income* atau *deferred revenue*, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada tahun buku bersangkutan

2.2.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.2.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. BUD
- e. Bendahara Penerimaan
 - a. Bendahara Penerimaan Pembantu
 - b. Fungsi Akuntansi SKPD
 - c. Masyarakat Pengguna Fasilitas

2.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. Kuitansi
- b. STS
- c. Surat Perjanjian/SKRD

2.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Menerima Kas	Kuitansi	Finansial
		Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan diterima dimuka R/K PPKD Kas di Bendahara Penerimaan

		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan - LRA
B. Manfaat telah diberikan dapat dihitung		Finansial
		Pendapatan diterima dimuka Pendapatan - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

BAB 3
PENDAPATAN

3.1 Pendapatan Pajak Daerah

3.1.1 Definisi

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Perda Nomor 9 Tahun 2010
- f. Pergub Nomor 120 Tahun 2016

3.1.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Kepala SKPD
- b. Koordinator Pajak
- c. PPK SKPD
- d. Bendahara Penerimaan
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

3.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. SKPD
- b. Bukti Pungut
- c. STS/Nota Kredit

3.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Pendaftaran Pajak oleh WP	SKPD	Finansial
		Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Mekanisme Pembayaran		
1. Penerimaan Pajak melalui BPn/Bank BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Penyetoran Kas oleh BPn ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Pajak - LRA
2.Penerimaan Pajak Langsung ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Pajak - LRA

3.2 Retribusi Daerah

3.2.1 Definisi

Pungutan daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3.2.2 Referensi

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009
- b. PP Nomor 58 Tahun 2005
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010
- d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- e. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- f. Perda Nomor 15 Tahun 2015

3.2.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Fungsi Akuntansi SKPD
- b. Masyarakat pengguna fasilitas

3.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. SKRD/Karcis/Bukti Lainnya
- b. Bukti Pungut
- c. STS/Nota Kredit

3.2.5 **Prosedur Pencatatan**

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Dengan Piutang		
1. Retribusi Jatuh Tempo	SKRD	Finansial
		Piutang Pendapatan Pendapatan Retribusi - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penerimaan Retribusi melalui BPn/Bank BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Penyetoran Kas oleh BPn ke Kasda	STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Retribusi-LRA
4. Penerimaan Retribusi Langsung ke Kasda	STS/NK	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Retribusi - LRA
B. Tanpa Piutang		
1. Retribusi Langsung Dibayar oleh WR		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyetoran Kas oleh BPn ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Pendapatan Retribusi-LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Retribusi - LRA

3. Penerimaan Retribusi Langsung ke Kasda	NK	Finansial
		R/K PPKD Pendapatan Retribusi-LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Retribusi - LRA

3.3 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3.3.1 Definisi

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah

3.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.3.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Kepala Daerah
- b. BUD
- c. Bendahara Penerimaan
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu
- e. Fungsi Akuntansi SKPD
- f. Bank

3.3.4 Dokumen dan Catatan

- a. Surat Keputusan Kepala Daerah
- b. SK Penghapusan
- c. Nota Kredit/STS
- d. Bukti Memorial

3.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
1. Setelah Penetapan Tidak Langsung disetor Ke Kasda		
a. Penetapan Penghapusan (saat nilai buku lebih tinggi dari nilai jual)	SK Penghapusan	Finansial
		Piutang Pendapatan Akumulasi Aset Lainnya Defisit Non Operasional Lain-lain PAD Yang Sah – LO Aset Lainnya

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penetapan Penghapusan (saat nilai buku lebih rendah dari nilai jual)	SK Penghapusan	Finansial
		Piutang Pendapatan Akumulasi Aset Lainnya Lain-lain PAD Yang Sah – LO Aset Lainnya Surplus Non Operasional
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
2. Setelah Penetapan Langsung disetor Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda (saat nilai buku lebih tinggi dari nilai jual)	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Akumulasi Aset Lainnya Defisit Non Operasional Lain-lain PAD Yang Sah – LO Aset Lainnya
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
b. Kas Disetorkan ke Kasda (saat nilai buku lebih rendah dari nilai jual)	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Akumulasi Aset Lainnya Lain-lain PAD Yang Sah – LO Aset Lainnya Surplus Non Operasional

		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
B. Jasa Giro / Pendapatan Bunga		
1. Kas auto debit/transfer ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
2. Penyesuaian pada akhir periode pelaporan (khusus Bunga Deposito)	BM	Finansial Tidak ada jurnal
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Penerimaan kekurangan pengakuan bunga setelah penyesuaian	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
C. Pendapatan Ganti Rugi		
1. Pengakuan Piutang	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

2.Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
D. Komisi/Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
E. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
F. Pendapatan Denda Pajak		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

G. Pendapatan Denda Retribusi		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
H. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
I. Pendapatan dari Pengembalian		
1. Penyetoran Kas	Bukti Pungut / NK / STS	Finansial
		R/K PPKD Ekuitas
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
J. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

K. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1. Saat terjadinya penjualan	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyetoran Kas untuk Pembayaran cicilan	Bukti Pungut / NK / STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
L. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
M. Pendapatan Sewa		
1. Diterima Dimuka dan Diterima melalui BPn		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di BPn Pendapatan Diterima Dimuka
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

c. Pengakuan Hak Pendapatan	Bukti Memorial	Finansial
		Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Diterima Dimuka dan Disetorkan Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Pendapatan Diterima Dimuka
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
b. Pengakuan Hak Pendapatan	Bukti Memorial	Finansial
		Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Dengan Piutang dan Diterima Melalui BPn		
a. Jatuh Tempo Sewa per akhir bulan	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di BPn Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan ke Kasda oleh BPn	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn

		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4. Dengan Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Jatuh Tempo Sewa per akhir bulan	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
5. Tanpa Piutang dan Penyetoran Tertunda		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di BPn Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penyetoran Kas	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
6. Tanpa Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO

		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
N. Denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa		
1. Dengan Piutang dan Diterima Melalui BPn		
a. Setelah melewati Jatuh Tempo	Bukti yang SAH	Finansial Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial Kas di BPn Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan ke Kasda oleh BPn	NK/STS	Finansial R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
2. Dengan Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Pengakuan Piutang	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/NK/STS	Finansial R/K PPKD Piutang Pendapatan

		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
3. Tanpa Piutang dan Penyetoran Tertunda		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di BPn Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penyetoran Kas	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4. Tanpa Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
O. Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor		
1. Penyetoran Tertunda		
a. Layanan telah diberikan dan Kas masih di Bendahara Penerimaan	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di BPn Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan oleh BPn	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn

		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
2. Penyetoran Langsung		
a. Layanan telah diberikan dan Kas disetorkan Langsung Ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
P. Pengolahan / Pembuangan Limbah		
1. Dengan Piutang dan Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Layanan telah diberikan	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Kas di BPn Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan oleh BPn	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
2. Dengan Piutang dan Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Layanan telah diberikan	Bukti yang SAH	Finansial
		Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		R/K PPKD Piutang Pendapatan
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
3. Tanpa Piutang dan Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Diterima oleh Bendahara Penerimaan	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di BPn Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4. Tanpa Piutang dan Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Langsung disetorkan ke Kasda	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
Q. Penerimaan Lain-lain		
1. Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Diterima oleh Bendahara Penerimaan	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di BPn Lain-lain PAD yang Sah-LO

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b.Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		R/K PPKD Kas di BPn
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD yang Sah - LRA
2. Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Langsung disetorkan ke Kasda	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		R/K PPKD Lain-lain PAD yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD yang Sah - LRA

3.4 Pendapatan Hibah

3.4.1 Definisi

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

3.4.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.4.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. Bendahara Penerimaan
- b. Pemberi Hibah
- c. Pengurus Barang
- d. Fungsi Akuntansi SKPD

3.4.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAST
- b. Nota Kredit/STS
- c. Naskah Perjanjian Hibah

3.4.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Uang		
1. Ketika BAST/Perikatan terbit	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak Ada Jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Barang		
1. Perolehan Barang	Naskah Perjanjian Hibah	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal
2. Perolehan Barang - Aset Tetap	BAST	Finansial
		Aset Tetap Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal
3. Perolehan Barang - Persediaan	BAST	Finansial
		Persediaan Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Tidak Ada Jurnal

BAB 4
BELANJA DAN BEBAN

4.1 Belanja dan Beban Pegawai

4.1.1 Definisi

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

4.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.1.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- e. Fungsi Akuntansi SKPD
- f. Pihak Penerima

4.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK/Daftar Penerima
- b. SP2D
- c. Kuitansi/Daftar Penerima

4.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Belanja Tidak Langsung		
1. Mekanisme LS		
a. Saat terhutang	SK/Daftar Penerima	Finansial
		Beban Pegawai Utang Belanja
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

b. Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		Kas di Bendahara Pengeluaran R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja Pegawai Perubahan SAL
c. Saat Pembagian	Daftar Penerima	Finansial
		Utang Belanja Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Belanja Langsung		
1. Mekanisme GU		
a. Saat terhutang	SK/Daftar Penerima	Finansial
		Beban Pegawai Utang Belanja
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pembayaran	Kuitansi/Daft ar Penerima	Finansial
		Utang Belanja Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Pegawai Perubahan SAL

4.2 Belanja dan Beban Barang dan Jasa

4.2.1 Definisi

Beban Barang Jasa merupakan Pemakaian atau konsumsi Barang dan Jasa untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah

4.2.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.2.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- e. Fungsi Akuntansi SKPD

4.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. Kuitansi
- b. SP2D
- c. Berita Acara Stock Opname

4.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Selain Dana Fungsional BLUD		
1. Belanja yang tidak menjadi persediaan		
a. Mekanisme UP/GU/TU	Kuitansi	Finansial
		Beban barang jasa Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL
b. Mekanisme LS	SP2D	Finansial
		Beban barang jasa R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL
2. Belanja yang menjadi persediaan		
a. Mekanisme UP/GU/TU	Kwitansi	Finansial
		Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL
b. Mekanisme LS	SP2D	Finansial
		Persediaan R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja barang dan jasa Perubahan SAL

3. Saat akhir bulan	BA Stock Opname	Finansial
		Beban Persediaan Persediaan
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Dana Fungsional BLUD		
1. Pembelian belanja yang tidak menjadi persediaan	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Pembelian belanja yang menjadi persediaan		
a. Saat pembelian	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Akhir bulan	BA Stock Opname	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.3 Belanja Modal

4.3.1 Definisi

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset

4.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.3.3 Pihak – Pihak Terkait

- a. PA/KPA
- b. BUD
- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- d. Fungsi Akuntansi
- e. Pengurus Barang

4.3.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP
- b. SP2D

4.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Saat Penerimaan Barang	BAPP	Finansial
		Aset Tetap Utang Belanja
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Mekanisme Pembayaran		
B. Saat Pembayaran (LS)	SP2D	Finansial
		Utang Belanja R/K PPKD
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL
B. Saat Pembayaran (GU)	Kwitansi	Finansial
		Utang Belanja Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Modal Perubahan SAL